

SEMANGAT MENUJU MULTIKULTURALISME

Oleh Mudjahirin Thohir

1. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia bukan saja hidup dan tinggal di dalam berbagai wilayah kepulauan yang berbeda-beda (majemuk), tetapi juga mereka berbeda-beda dalam segi etnik, suku bangsa, agama, dan golongan. Perbedaan-perbedaan seperti itu, sebagiannya sudah terjadi sejak mereka lahir, tetapi juga perbedaan-perbedaan itu terjadi atas dasar pilihan yang paling memungkinkan dilihat dari lingkungan sosial dan fisikalnya.

Perbedaan yang sudah sejak lahir ada adalah seperti etnis. Anak seorang Papua, ia lahir sebagai anak keturunan orang Papua. Begitu pula anak orang Jawa, ia lahir sebagai anak keturunan orang Jawa. Untuk selanjutnya, apakah mereka mengikuti suatu agama dengan faham tertentu, mengikuti suatu kelompok politik tertentu, bergabung dalam suatu aktivitas tertentu, adalah dipengaruhi oleh lingkungan sosial di mana mereka hidup dan dibesarkan, termasuk kemudian karena alasan-alasan keyakinan diri maupun karena pilihan-pilihan rasionalnya.

Berbagai perbedaan seperti itu, oleh Tuhan tidak dilihat sebagai bencana, tetapi justru diberi ruang untuk berinteraksi dan saling bekerjasama. Di antara syarat untuk bisa bekerja sama adalah terciptanya kondisi saling: mengenal, menghormati, menerima, dan memberi ruang -- dalam kerangka pemenuhan kebutuhan hidup manusia sebagai makhluk sosial secara bermartabat. Sayangnya, pesan Tuhan seperti itu sering terabaikan. Akibat yang muncul di antaranya ialah lahirnya **segregasi sosial** dan bahkan **konflik**.

Segregasi sosial adalah pemilahan sosial berdasarkan pada ciri-ciri dasar yang berbeda atau yang dianggap berbeda atau sengaja membuat beda,

baik dalam arti fisik maupun kultural dan oleh karena perbedaan itu pula, menjadikan mereka menempatkan diri dalam satuan-satuan sosialnya secara berlawanan dengan satuan sosial lainnya. Corak dari segregasi sosial adalah timbulnya anggapan bahkan pandangan: *in group* lawan *out group*; kami atau mereka; aku atau dia. Dalam kondisi seperti ini, nilai-nilai dari hubungan kemanusiaan dipersempit menjadi hubungan kepentingan, bahkan hubungan persekongkolan.

Timbulnya pandangan *in group* lawan *out group* ini, dalam banyak hal memudahkan timbulnya peruncingan-peruncingan. Peruncingan seperti itu, akan memperoleh lahannya secara luas ketika di antara mereka terjadi kompetisi. Kompetisi untuk memperebutkan hal-hal yang bersifat prinsipil, strategis, dan perspektif. Dalam situasi seperti itu, umumnya mereka – dalam satu segi -- mengutamakan kelompoknya itu – dan dalam segi yang lain –melahirkan kecenderungan-kecenderungan negatif kelompok lain, seperti: prasangka, penolakan, dan kebencian. Suatu model penilaian *like and dislike* – yang bisa mengarah kepada timbulnya konflik. Dalam kehidupan sosial, gejala-gejala seperti itu bisa berlangsung atau tetap akan berlangsung dengan berbagai alasan di antara kelompok-kelompok masyarakat baik karena alasan memperjuangkan agama (baca: komunitas keagamaan), memperjuangkan hak-hak politik warga, sumber-sumber kemakmuran, dan lain-lain.

Segregasi sosial dan konflik, bisa muncul antara lain, karena cara pandang dan cara menempatkan serta memperlakukan perbedaan-perbedaan itu ditarik ke dalam kepentingan-kepentingan sepihak. Orang dalam satu agama, bisa berbeda aliran. Orang yang satu agama dan satu aliran, bisa berbeda dari segi interest politiknya, dan seterusnya. Pada gilirannya, orang-orang yang dalam satu kolektif (satu agama, atau satu aliran, atau satu interest politik, atau keseluruhannya itu) mempunyai kecenderungan-kecenderungan umum: mengutamakan kolektifnya yang sekaligus menomerduakan kelompok lain; menganggap benar, superior, dsb. Dalam

waktu yang bersamaan, mereka menganggap kelompok lain salah, lemah, dsb. Inilah gejala awal dari munculnya konflik.

Perasaan bahkan keyakinan seperti itu, dalam perspektif kebudayaan dapat dikaji dari proses sosialisasi kebudayaan (*cultural socialization process*) secara linier, yakni lewat proses sosialisasi, lewat ranah (*domain*) satu arah. Dari proses sosialisasi yang bercorak *linier* tadi, maka secara pelan, orang hanya akan mengenal positif pihaknya dan menempatkan secara negatif pihak lain yang berbeda. Orang-perorang yang merasa dalam satu agama (misalnya dalam satu agama Islam) maka perbincangan keislaman itu, tidak berhenti sampai di sini. Konon ada 73 aliran di dalam Islam itu, tetapi hanya satu yang benar. Siapa belajar kepada siapa dan mempunyai aliran apa? Seringkali memberi ruang kepada perdebatan: surga neraka. Menarik masuk agama dalam kepentingan seperti ini akan sering berakhir dengan ketegangan dan konflik serta bisa berujung pada kekerasan sosial. Di sinilah bahayanya ketika berbagai persoalan perbedaan, termasuk perbedaan dalam hal beragama, dilihat dan didekati oleh para pelakunya secara linier dan dengan perspektif monokultural.

Tulisan ini akan mendiskusikan tentang arti pentingnya pemahaman multikulturalisme dan bagaimana proses menuju ke sana. Permasalahannya lalu, bagaimana mengubah pandangan monokulturalisme menuju kepada pandangan multikulturalisme dengan mengeliminasi sejauh mungkin konflik? Sejauh mana pula pendekatan *culture fertilization*¹ berperan dan diperankan dalam konteks itu?

¹ *Fertilization -- in biology, is a process in the reproduction of both plants and animals, involving the union of two unlike sex cells (gametes), the sperm and the ovum, followed by the joining of their nuclei. In the flowers of higher plants, the process occurs after pollination has enabled the sperm to contact the egg cell in the plant's ovary. In lower plants and in animals the sperm is actively motile and swims to the egg through an external aqueous medium or through a fluid environment within the reproductive tract of the female. The fundamental principle of fertilization is the same in all organisms. The first sperm to establish successful contact is absorbed by the ovum and the two nuclei unite, thus combining the hereditary material of both parents (see genetics). In higher forms, the sperm contact initiates cell division in the fertilized egg (zygote), and the subsequent embryo develops into a new individual. Cross-fertilization indicates fusion of a sperm of one hermaphroditic plant or animal with an ovum of another, as distinguished from self-fertilization, in which ovum and sperm of the same individual are fused. (The Columbia*

2. Masyarakat Majemuk Indonesia

Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk (*plural society*), yaitu sebuah masyarakat negara yang terdiri atas lebih dari 500 sukubangsa (ethnik) yang dipersatukan oleh sistem nasional dalam wadah sebuah negara kesatuan Indonesia. Jika corak masyarakat majemuk Indonesia yang ditandai pada kesukubangsaan dan kelompok-kelompok sukubangsa yang beranekaragam kebudayaannya ini tidak dikelola secara tepat, maka akan mudah melahirkan potensi-potensi destruktif, di antaranya: (a) masyarakat majemuk yang menghasilkan batas-batas sukubangsa yang didasari oleh stereotipe dan prasangka negatif. Jika ini dibiarkan tanpa arah bangunan ke-Indonesia-an yang jelas, bisa memicu munculnya stigma sosial dan pengambinghitaman antarsukubangsa; (b) Pada gilirannya, kondisi seperti itu akan dengan mudah melahirkan cara pandang perbedaan secara diskriminatif antarsukubangsa itu sendiri. Cara pandang diskriminatif ini tercermin antara lain pada perbedaan warga (suku) asli versus pendatang disertai dengan sikap merendahkan dan kebencian, seperti kasus konflik Sambas, Ambon, Kalimantan Tengah, dsb; dan (c) kondisi yang demikian itu akan semakin dikukuhkan ketika ada kepentingan yang lebih luas, misalnya kepentingan politik kekuasaan dan perebutan sumber-sumber daya alam. Dalam hal ini, perbedaan dan sikap, serta tindakan membeda-bedakan, dimanfaatkan untuk kepentingan individu atau kelompok dengan mengabaikan kepentingan yang lebih luas yaitu kesatuan dan persatuan Indonesia.

Pada era pemerintahan Presiden Sukarno misalnya, fenomena seperti di atas dicoba diselesaikan dengan melarang kesukubangsaan sebagai potensi kekuatan politik, guna keutuhan bangsa Indonesia dan memenangkan semangat nasionalisme. Kebijakan politik kesukubangsaan

waktu itu – adalah politik amalgasi atau peleburan sukubangsa-sukubangsa menjadi sebuah bangsa yaitu Indonesia, melalui perkawinan antarwarga sukubangsa yang berbeda-beda. Kemudian pada era pemerintahan Suharto, tidak hanya kebijakan pelarangan penggunaan sukubangsa sebagai acuan kepentingan politik, tetapi juga pelarangan potensi politik dari agama dan ras sebagaimana konsep SARA. Rupanya, pelarangan yang dilakukan secara represif dengan menggunakan kekuatan militer secara otoriter, ternyata hanya meredam berbagai gejolak sosial yang bersifat semu. Begitu pula kebijakan ”penyeragaman” corak pemerintahan pada tingkat pedesaan yang secara tradisional bercorak semi-otonomi menjadi bercorak seperti pemerintahan desa Jawa yang dikuasai dan dikendalikan oleh pemerintah yang dilakukan oleh Ditjen PUOD, justru berakibat kepada lemah dan melemahnya kekuatan kearifan lokal (*local wisdom*) sebagai acuan masyarakat untuk dapat mengatur lingkungan sosialnya. Ini berarti bahwa desain untuk membangun masyarakat madani (bercorak demokratis dan multikulturalistik) telah mengalami kegagalan.

Mendesain ulang masyarakat plural yang monokultural ke dalam masyarakat multikultural yang berpandangan multikulturalisme, karenanya menjadi tuntutan yang mendesak.

3. Pendekatan *Culture Fertilization*

Inti dari apa yang disebut kebudayaan ialah ”cara hidup masyarakat, baik masyarakat dalam artian sempit seperti masyarakat-masyarakat tertentu yang dibatasi oleh kesatuan wilayah atau etnisitas, tetapi juga masyarakat dalam arti luas seperti masyarakat bangsa. Cara hidup tadi terinternalisasi dan tersosialisasi secara berkelanjutan sehingga membentuk pandangan dan pengetahuan, keyakinan dan anggapan-anggapan, yang keseluruhannya itu menjadi dan dijadikan model tindakan dan hasil tindakan. Pada masing-masing masyarakat tadi, dalam batas-batas tertentu memiliki perbedaan

sekaligus persamaan dengan masyarakat di luarnya. Perbedaan-perbedaan yang menjadi khas dari masing-masing masyarakat yang bersangkutan – jika diakumulasikan – menjadi masyarakat yang multikultural, dan karena itu ia memiliki potensi-potensi yang bisa bercorak negatif, tetapi juga sebaliknya menjadi potensi positif.

Dilihat dari isi (substansi: pengetahuan dan keyakinan) maupun ekspresi (tindakan dan keputusan), setiap kebudayaan itu dinamik. Karena itu, dilihat dari dimensi ruang dan waktu, kebudayaan-kebudayaan masyarakat itu dapat dipilah ke dalam tiga corak, yaitu (1) kebudayaan yang sudah terbentuk/membentuk; (2) kebudayaan yang sedang membentuk; dan (3) kebudayaan yang direncanakan untuk dibentuk.

Dalam konteks Indonesia, kebudayaan-kebudayaan sukubangsa yang sudah membentuk itu, seharusnya dijadikan "acuan awal" untuk memahami potensi-potensi yang bisa menyumbangkan kepada konsep kebudayaan dewasa ini (sedang membentuk) dan kebudayaan Indonesia dalam rancangan ke depan, baik dalam level masyarakat Indonesia sendiri maupun dalam kaitannya dengan pergaulan dan persinggungan dengan kebudayaan-kebudayaan global.

Upaya-upaya untuk mencapai idealitas yang tak terjerabut dari akar-akar kebudayaan kesukubangsaan, salahsatunya ialah dengan pendekatan *culture fertilization*. Makna *culture fertilization* sebagai pendekatan di sini ialah mendesain perbedaan-perbedaan budaya (sebagaimana masyarakat Indonesia) sebagai potensi (*anugerah/maslahat*) bukan sebagai kerugian (*madharat*), dengan cara memadukan, meramu, dan mengembangkannya sesuai dengan tuntutan dan perubahan sosial, sehingga menjadikan kekuatan dan penguatan ke-Indonesia-an. Cara yang bisa ditempuh ialah melalui penerimaan dan penghormatan perbedaan itu sendiri dalam satu sisi, dan mencari titik temu kesamaan sebagai identitas keindonesiaan dalam sisi yang lain. Kedua hal itu, menjadi prasyarat dari suatu wujud masyarakat madani yang ciri-cirinya antara lain demokratisasi. Masyarakat demokratis adalah masyarakat yang dalam ciri-ciri kulturalnya menunjukkan bahwa

warganya memiliki kesadaran terhadap keberagaman dan karena itu cara hidup yang dinilai beradab ialah menghargai perbedaan itu sendiri sekaligus mengupayakan mencari titik temu yang memungkinkan guna kepentingan yang lebih luas. Kesadaran dan penghargaan atas perbedaan demikian, baru memungkinkan kalau didukung oleh faktor-faktor lain seperti keteraturan hukum, keadilan sosial ekonomi dan politik.

Dengan kata lain, proses-proses menuju ke sana tidak lalu berarti tanpa memunculkan konflik, tetapi konflik yang terjadi dalam proses menurut prinsip demokrasi harus mengikuti hukum atau aturan main yang adil dan beradab. Ketaatan atau kepatuhan pada hukum yang berlaku, adalah salah satu syarat mutlak bagi berlakunya demokrasi dalam kehidupan masyarakat. Tanpa adanya ketaatan pada hukum, maka yang ada adalah kerumunan dan kekacauan, di mana masing-masing pihak atau kekuatan berlaku semena-mena. Jadi melalui hukum inilah kebudayaan dan peradaban seperti halnya perikemanusiaan, termasuk terwujudnya kesetaraan derajat individu demi kesejahteraan bersama, dapat ditegakkan.

4. Penutup

APA yang bisa kita petik dari kajian di atas adalah pelajaran mengenai sikap manusia yang sering paradoksal. Pengetahuan dan niat baik saja ternyata tidak cukup. Tidak selalu niat baik menghasilkan tujuan baik, karena dalam perjalanannya manusia tergoda dan terbius kepentingan jangka pendek. Begitu pula, niat damai tak selalu dipahami orang agar dicapai dengan jalan damai pula. Sebagian dari mereka cenderung menggunakan jalan kekerasan.

Pertanyaannya, sejauh mana jalan kekerasan bisa mewujudkan kedamaian? Dalam kasus masyarakat manakah jalan kekerasan bisa menghasilkan kedamaian? Itulah sebabnya, kita menjadi sadar bahwa ketika orang atau suatu kelompok melihat kelompok lain sebagai “lawan” dan oleh karena itu, adalah wajar untuk dimusuhi bahkan dilawan – **ternyata**

pandangan itu adalah hasil konstruksi manusia sendiri. Jika demikian halnya, maka tugas kita adalah “membongkar” konstruksi sosial itu, lalu membangun kembali menjadi bangunan di mana setiap manusia merasa nyaman memasuki bangunan tadi.

Untuk itu, kita masih perlu belajar bagaimana menumbuhkan kesanggupan bukan saja untuk melihat dan memperlakukan orang lain sebagai saudara, tetapi juga **mendesain bangunan persaudaraan itu sendiri.** Inilah esensial dari mempersatukan dan menyatukan kebudayaan-kebudayaan masyarakat Indonesia. Inilah esensi dari menumbuhkan bangunan multikulturalisme di dalam kebhinnekaan.***

5. Daftar Bacaan

Ali, As'ad Said

2009 Negara Pancasila. Jakarta: LP3ES.

Azra, Azyumardi

2008 “Pendidikan di Tengah Peradaban Dunia: Perspektif Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural”, dalam <http://www.setneg.go.id>

Kessler, Gary E

2001 *Voices of Wisdom – a Multicultural Philosophy Reader*. USA: Wadsworth.

Latif, Yudi

2012 *Negara Paripurna*. Jakarta: Gramedia

Saifuddin, Achmad Fedyani

2007 “Kesukubangsaan, Nasionalisme, dan Multikulturalisme”, dalam *Hak Minoritas, Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa*. Jakarta: The Interseksi Foundation.

Suparlan, Parsudi

1999 "Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya", dalam *Antropologi Indonesia*. Tahun. XXIII, No. 59, Mei – Agustus. Hlm. 7 -19.

- 2001 “Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural”, paper untuk Simposium Internasional, di Bali (16-21 Juli 2002).
http://www.scripps.ohiou.edu/news/cmdd/artikel_ps.htm

Thohir, Mudjahirin

- 2007 *Kekerasan Sosial dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia – Suatu Pendekatan Sosial Budaya*. (Pidato Pengukuhan Guru Besar Undip).
- 2013 *Multikulturalisme: Agama, Budaya, dan Sastra*. Semarang: Gihipustakamandiri.